

# RENCANA STRATEGIS DISBUNAK TAHUN 2016 – 2021 (PERUBAHAN)



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2019**

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512  
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini adalah penjabaran dari *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah gambaran arah kebijakan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021.

Tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal, Mei 2019

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. Melan Bangun  
Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.</b>	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	8
1.4.Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	12
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	38
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.	57
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	59
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	64
3.3. Telaah Renstra K/L.	68
3.4. Telaah Renstra Disbun Prov.Jambi	72
3.5. Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi	74
3.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	79
3.7. Penentuan Isu – Isu Strategis	84
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah	87
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	89
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	93
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	98
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Rencana Strategis ( **Renstra** ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun secara rinci oleh satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 5 Tahun, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam rencana kerja OPD setiap tahun yang terintegrasi melalui program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan prinsip kebutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan sektor perkebunan dan peternakan dituangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan sebelumnya. Kesiambungan penetapan sasaran pembangunan Perkebunan dan Peternakan merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (**strengths**), kelemahan

---

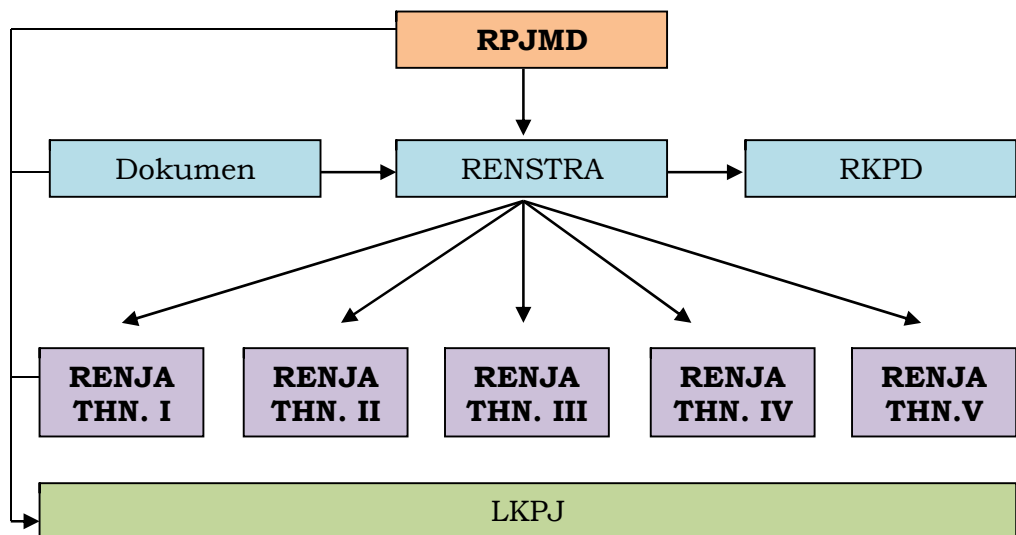
1 | *Renstra Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Tahun 2016-2021*

**(weakness)**, peluang (**opportunities**) dan ancaman (**threats**) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra Satuan Kerja merupakan Dokumen Perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan turunan/ penjabaran lebih lanjut dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan Pedoman Perencanaan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang

baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :



## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
- 23) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 25) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;

- 26) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;
- 27) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud.**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

**b. Tujuan.**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016- 2021;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 disusun dengan *Sistematika Penulisan* sebagai berikut :

**HALAMAN JUDUL**  
**KATA PENGANTAR**  
**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**DAFTAR ISI**

### **BAB I. PENDAHULUAN.**

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra K/L.
- 3.4. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah  
Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.



Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas perkebunan dan Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kepala Seksi

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Perbenihan
  2. Seksi Produksi
  3. Seksi Perlindungan
- d. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Pembibitan dan Produksi.
  2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
  3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Lahan dan Irigasi.
  2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.
  3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Penyuluhan.
  2. Seksi Pengolahan.
  3. Seksi Pemasaran.

- g. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**, terdiri dari :
  - 1. UPTD Lab. Hayati
  - 2. UPTD Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu
  - 3. UPTD Kecamatan Bram Itam
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perkebunan dan peternakan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
  - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Perkebunan dan Peternakan;
  - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
  - e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan;
  - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

## **Sekretaris**

1. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
  - b. Melaksanakan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
  - c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait lingkup tugas;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
  - f. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan bidang-bidang dan
  - g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

## **BIDANG PERKEBUNAN**

- (1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perkebunan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varitas unggul, bimbingan teknis perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi

penyediaan dan pengawasan penggunaan benih, pengendalian dan pengamatan OPT, bimbingan kelembagaan OPT, penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungan perkebunan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Perbenihan.**

- (1) Seksi Perbenihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pengujian, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih, pengembangan vaeritas unggul pemberian bimbingan produksi benih, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup perbenihan perkebunan.

Seksi Perbenihan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan;
- b. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;

- c. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan Pengolahan di bidang Perkebunan;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan perkebunan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### **Seksi Produksi.**

(1) Seksi Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, penyiapan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup produksi perkebunan.

Seksi Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan.
- c. Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan.

- d. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan produksi perkebunan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### **Seksi Perlindungan**

(1) Seksi Perlindungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengendalian, bimbingan teknis, pengamatan, pengolahan, penanggulangan bencana, pemberian rekomendasi pemantauan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian dilingkup perlindungan.

Seksi Perlindungan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perlindungan;
- b. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih, bahan pengendalian OPT, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT serta pengolahan data OPT bidang Perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapangan pengendalian hama



- terpadu serta bimbingan teknis perlindungan dan Pengolahan Perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam, gangguan kebakaran lahan dan kebun dan gangguan usaha perkebunan;
  - e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan perlindungan perkebunan;
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **BIDANG PETERNAKAN**

- (1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan, pelaksanaan, perencanaan kebutuhan, pembinaan bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang peternakan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

- pengendalian, penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT, pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan pemberdayaan kelompok peternak serta bimbingan produksi ternak;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon pengaduh ternak, penyusunan kawasan sentra produksi ternak dan kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, menyusun standard pola gaduhan ternak pemerintah, dan redistribusi ternak serta penilaian ternak;
  - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran obat hewan, pemotongan hewan, penanggulangan penyakit zoonosis, penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pembibitan dan Produksi**

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi lingkup perbibitan dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pembibitan dan Produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT), pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT dan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak dan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

### **Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak.**

- (1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan kawasan ternak, penyiapan lokasi dan peternak, mengelola administrasi gaduhan ternak, penilaian ternak Pemerintah dan redistribusi ternak lingkup Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- c. Melakukan identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak;
- d. Melakukan penyusunan kawasan sentra produksi ternak, kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, penyusunan standard pola gaduhan ternak pemerintah dan mengkoordinasikan lokasi kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan bersama;

- e. Melakukan rencana sarana dukungan kerjasama dengan provinsi dan pusat dalam Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- f. Melaksanakan administrasi gaduhan ternak, pelaksanaan redistribusi ternak dan penilaian ternak pemerintah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan pendokumentasian kegiatan Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### **Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan peredaran obat hewan dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
- d. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan serta mengawasi pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;
- e. Melakukan pengawasan menanggulangi penyakit Zoonosis dan melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **BIDANG PRASARANA DAN SARANA**

1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang prasarana dan sarana;
  - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan dan peternakan;
  - c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, perhitungan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan, peternakan;
  - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, tata cara usaha perkebunan dan peternakan, bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Lahan dan Irigasi**

Seksi Lahan dan Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;
  - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi lahan Perkebunan dan Peternakan;
  - c. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan Perkebunan dan Peternakan;
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi Perkebunan dan peternakan; dan



- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugasnya.

### **Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin**

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penghitungan, pengawasan peredaran, penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin serta dan peternakan;

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan dan peternakan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### **Seksi Pembiayaan dan Investasi.**

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan pendampingan dan supervisi, tatacara usaha, rekomendasi perizinan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan;

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;

- b. Melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembiayaan dan investasi, bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi serta fasilitasi pelayanan investasi perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan ;
- d. Melakukan pemberian informasi dan rekomendasi tata cara usaha perkebunan dan peternakan dan bantuan permodalan di bidang perkebunan dan peternakan ;
- e. Melaksanakan tata cara usaha, pemberian izin/rekomendasi teknis dibidang perkebunan dan peternakan;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

## **BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, pengolahan serta pemasaran perkebunan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan bagi penyuluhan, pekebunan dan peternakan, penyusunan jadwal penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis dan pengembangan unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan Pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar Perkebunan dan Peternakan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Penyuluhan**

- (1) Seksi Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup penyuluhan perkebunan dan peternakan

Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- b. Melakukan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyusunan rencana dan jadwal penyelenggaraan penyuluhan, penyiapan pelaksanaan penyebaran materi, metode penyuluhan dan bahan penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan supervisi penyuluhan perkebunan dan peternakan, pembinaan menumbuh kembangkan lembaga petani dan rencana pembinaan serta pemberdayaan bagi penyuluhan perkebunan dan peternakan;

- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkebunan dan peternakan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### **Seksi Pengolahan.**

- (1) Seksi Pengolahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan bimbingan dan pengembangan, penerapan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Perkebunan dan Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil, dan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang Perkebunan dan peternakan ;

- d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### **Seksi Pemasaran.**

- (1) Seksi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan.

Seksi Pemasaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pemasaran;
- b. melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Pemasaran hasil Perkebunan dan peternakan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan Pemasaran dan hasil Perkebunan peternakan, dan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- d. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan dan peternakan;

- e. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Perkebunan dan Peternakan ;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pemasaran di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### **Kelompok Jabatan fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



*Kepala Dinas Perkebunan dan  
Peternakan*

*Sekretaris*

*Sub Bagian Umum &  
Kepegawaian*

*Sub Bagian Keuangan*

*Sub Bagian  
Perencanaan, Evaluasi  
dan Pelaporan Program*

*Bidang  
Perkebunan*

*Bidang  
Peternakan*

*Bidang  
Prasarana Sarana*

*Bidang  
Penyuluhan, Pengolahan  
& Pemasaran*

*Seksi  
Perbenihan*

*Seksi  
Perbibitan dan Produksi*

*Seksi  
Lahan dan Irigasi*

*Seksi  
Penyuluhan*

*Seksi  
Produksi*

*Seksi  
Keswan dan Kesmavet*

*Seksi  
Pupuk, Pestisida, Alat & Mesin*

*Seksi  
Pengolahan*

*Seksi  
Perlindungan*

*Seksi  
Penyebaran & Pengembangan*

*Seksi  
Pembiayaan dan Investasi*

*Seksi  
Pemasaran*

*UPTD*

- *UPTD Laboratorium Hayati*
- *UPTD Kesehatan Hewan dan Kesmavet*

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.



Dalam Rangka mendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memadai baik kualitasnya maupun kuantitas. Selanjutnya Data SDM ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Data ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Gol/Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan			
			SLTA	Diploma	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7
1	IV/c	1	-	-	1	-
2	IV/b	3	-	-	3	-
3	IV/a	2	-	-	1	1
4	III/d	13	4	-	9	-
5	III/c	9	2	1	5	1
6	III/b	3	-	-	3	-
7	III/a	2	1	-	1	-
8	II/d	3	3	-	-	-
9	II/c	3	3	-	-	-
10	II/b	4	4	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-
12	TKK/TKS	36	26	-	9	-
	<b>Jumlah total</b>	<b>88</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>2</b>

## Unit Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan



Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai 3 (tiga) unit **UPTD** masing-masing di **Kecamatan Tungkal Ilir**, **Kecamatan Bram Itam** dan **Kecamatan Tungkal Ulu**. Selain adanya UPTD Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mempunyai **Pos Keswan dan IB**.

Untuk pelayanan kesehatan hewan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (lima) pos keswan, 5 petugas Medis dan 6 petugas para medis yang tersebar di masing-masing Kecamatan. ( Tabel 2.2 )

**Tabel 2.2** Jumlah Petugas Medis dan Paramedis Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Petugas Medis	Petugas Paramedis	Keterangan
1	Tungkal Ilir	3	1	Medis PNS 3 orang , paramedis Tenaga honorer 1 orang
2	Betara	1	-	PNS
3	Pengabuan	-	1	PNS
4	Senyerang	-	1	Tenaga Honorer
5	Tungkal Ulu	1	1	Tenaga Honorer
6	Merlung	2	1	Tenaga Honorer
7	Batang Asam	-	1	Tenaga Honorer



Dilihat dari jangkauan lokasi dan medan yang cukup berat jumlah petugas medis dan paramedis masih sangat minim. Untuk optimalnya masing-masing

Kecamatan mempunyai 1 (satu) unit pos keswan dan 1 (satu) orang petugas medis dan dibantu 2 orang petugas paramedis.

Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak salah satu usaha dengan program inseminasi buatan (IB) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak baik kualitas maupun kuantitas.



Jumlah Pos IB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 11 unit dengan petugas IB sebanyak 12 orang, petugas PKB 8 orang dan petugas ATR 7 orang yang tersebar dimasing-masing Kecamatan ( Tabel 2.3 )

**Tabel 2.3** Jumlah Petugas IB, PKB, ATR dan Recorder di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	KECAMATAN	PETUGAS IB	PETUGAS PKB	PETUGAS ATR
1	TUNGKAL ILIR	-	2	2
2	BRAM ITAM	1	1	1
3	SEBERANG KOTA	-	-	-
4	BETARA	3	-	-
5	KUALA BETARA	-	-	-
6	PENGABUAN	1	1	1
7	SENYERANG	3	1	1
8	TUNGKAL ULU	1	1	1
9	TEBING TINGGI	1	-	-
10	MUARA PAPALIK	1	-	-
11	BATANG ASAM	1	1	-
12	MERLUNG	-	1	1
13	RENAH MENDALUH	-	-	-
<b>TOTAL</b>		12	8	7

## Aset/Modal

Adapun Sarana, Prasarana serta Perlengkapan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan *Desember 2017* antara lain :

No	Jenis Klasifikasi Aset	Saldo Per- 31 Desember 2017
<b>I</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>9,347,465,115,-</b>
1	Tanah	890,453,500,-
2	Peralatan dan Mesin	3,701,211,572,-
3	Gedung dan Bangunan	2,805,455,843,-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	469,399,200,-
5	Aset Tetap Lainnya	1,459,950,000,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	20,995,000,-
<b>II</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>3,689,567,900,-</b>
1	Aset tak Berwujud	-
2	Aset lainnya	3,689,567,900,-
<b>III</b>	<b>TOTAL ASET INTRACOUNTABLE</b>	<b>13,037,033,015,-</b>
<b>IV</b>	<b>ASET EXTRA COUNTABLE</b>	<b>-</b>
<b>Total Aset Intra + Extra</b>		<b>13,037,033,015,-</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.



Pada tabel. 2.4. di bawah ini terlihat bahwa Capaian Kinerja Bidang Perkebunan lima tahunan 2011 sampai dengan 2015 cukup baik dengan capaian rata-rata mencapai 90 %. Ada

beberapa kegiatan yang target capaiannya didalam rencana kinerja lima tahunan 2011-2016 tidak mencapai target yang di harapkan, antara lain peremajaan kelapa, peremajaan karet dan pengembangan kakao, hal ini terjadi karena beberapa kendala antara lain, pengurangan pendanaan akibat terjadinya devisa baik pendanaan dari APBD Kabupaten maupun APBN. Namun di komoditi yang lain seperti kelapa sawit dan pinang mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat harga komoditi tersebut bagus dan relatif stabil.

Capaian kinerja Bidang Perkebunan kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sisi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian rata-rata realisasi anggaran mencapai 83 %, namun jika dilihat dari pertumbuhan anggaran dari 6 program unggulan hanya satu program yang mengalami pertumbuhan anggaran secara baik, sedangkan 5 program mengalami minus pertumbuhan. Progres capaian kinerja anggaran dapat dilihat dalam Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Perkebunan**  
**Tahun Anggaran 2011 – 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Uraian	TARGET					Realisasi					Rasio antara realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	<b>Prog.Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	70.818.002	72.068.000	191.773.900	209.929.600	135.399.900	70.818.001	66.051.000	169.030.150	181.374.200	107.122.225	100,0	91,7	88,1	86,4	79,1	-28,4%	-4,90%
2	<b>program peningkatan ketahanan pangan</b>	<b>618.886.504</b>	<b>732.258.200</b>	<b>529.201.850</b>	<b>299.577.400</b>	<b>258.782.500</b>	<b>578.964.200</b>	<b>681.265.200</b>	<b>319.737.350</b>	<b>238.248.800</b>	<b>226.860.500</b>	93,5	93,0	60,4	79,5	87,7	-16,1%	-3,20%
	(Pertanian/perkebunan)																	
3	<b>peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	-	-	133.267.000	148.962.500	98.392.800	-	-	34.797.000	60.559.400	81.398.691	#DIV/0!	#DIV/0!	26,1	40,7	82,7	15,3%	17,30%
4	<b>Prog. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	-	-	282.729.000	-	-	-	-	101.194.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	35,8	#DIV/0!	#DIV/0!	20,0%	
5	<b>Prog.Pengembangan Agribisnis</b>	-	111.814.000	77.331.000	-	128.816.000	-	108.174.500	72.646.000	-	119.628.000	#DIV/0!	96,7	93,9	#DIV/0!	92,9	-8,9%	-0,60%
6	<b>Prog.Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	<b>1.748.356.507</b>	<b>2.833.055.000</b>	<b>4.374.678.550</b>	<b>4.280.977.700</b>	<b>1.329.132.400</b>	<b>1.688.826.400</b>	<b>2.942.292.560</b>	<b>3.404.318.400</b>	<b>3.517.210.740</b>	<b>1.116.007.690</b>	96,6	103,9	77,8	82,2	84,0	-4,30	-3,80%
		3.056.947.517	4.593.267.400	6.195.514.150	5.736.166.100	2.444.952.500	2.917.572.801	4.587.222.960	4.494.106.250	4.671.603.240	2.080.683.006	95	73	73	75	85		



**Tabel 2.5**  
**Realisasi Rencana Strategis**  
**Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2011 – 2015**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Program Bid. Perkebunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan SDM Petani Perkebunan				85%	85%	85%	90%	95%										
	(1) Pelatihan Pemberdayaan Petani SKE	50 kelas	50 kelas	Jumlah petani	10 kls	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	20%	20%	20%	20%	20%
	(2) Lomba Kelompok Tani Perkebunan	45 klp	45klp	Jumlah kelompok petani	-	45 Klp	45 Klp	45 Klp	45 Klp	-	-	-	45 klp	-	0%	0%	0%	20%	0%
	(3) Pembinaan kelembagaan dan Kemitraan Perkebunan	4 Asosiasi	4 Asosiasi	Jumlah Asosiasi yang dibina	-	4 aso	4 aso	4 aso	4 aso	-	4 Aso	4 Aso	-	5 Aso penilai & 19 pers	-	20%	20%	-	20%
Peningkatan ketahanan pangan perkebunan	Untuk mendukung peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan				80%	80%	80%	90%	95%										
	(1) pengendalian hama penyakit tanaman	600 Ha	600 Ha	Jumlah lahan perkebunan yg dilakukan pengendalian hama	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	20%	20%	20%	20%	20%

	(2) peningkatan perlindungan usaha perkebunan	600 Ha	600 Ha		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(3) pemetaan lahan perkebunan	5 kom	5 kom		1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	-	-	-	20%	20%	0%	0%	0%
	(4) dana sinergis program sarana pertanian/perkebunan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	620 Batang paralon	-	-	-	0%	0%	20%	0%	0%
Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Meningkatkan sarana prasarana pembangunan perkebunan																		
	(1) pengadaan sarana prasana pertanian	85%		Jumlah bantuan sarana dan prasarana pertanian	-	0%	85%	90%	95%	-	-	10 unit pengupas kopi, 4500 m jaring babi, 20 unit lantai jemur, 425 batang paralon	1500 m jaring babi, 40 unit lantai jemur	-	0%	0%	20%	20%	0%
	(2) dana sinergis pengolahan hasil perkebunan				80%	80%	80%	90%	95%		6 unit alat pengolahan				20%	20%	20%	20%	20%
	(3) promosi pemasaran hasil perkebunan	85%		Tersedianya informasi harga komoditi perkebunan	-	-	100%	100%	100%			1 informasi harga 12 bulan	1 informasi harga 12 bulan	1 informasi harga 12 bulan	20%	20%	20%	20%	20%
Peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Peningkatan penerapan IPTEK				85%	85%	85%	90%	95%										
	(1) pemeliharaan lanjutan kebun	5 Ha	5 Ha		5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%

	percontohan kelapa sawit																		
	(2) integrasi ternak besar kelapa sawit	12 unit	12 unit		-	-	3 unit	3 unit	4 unit			3 unit	3 unit	-	0%	0%	20%	20%	0%
	(3) magang/pelatihan petani karet, kopi, kelapa dan sawit	125 org	125 org		25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	-	25 org	25 Org	-	-	0%	0%	20%	20%	0%
Peningkatan produksi perkebunan	Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan, kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kopi dan pinang				80%	80%	85%	85%	90%										
	(1) pembibitan kelapa sawit	70.000 kecambah	70.000 kecambah		15.000 kecambah	34.500 kecambah	30.000 kecambah	20.000 kecambah	25.000 kecambah	15.000 kecambah	34.500 kecambah	30.000 kecambah	20.000 kecambah	25.000 kecambah	21%	49%	43%	29%	29%
	(2) pemeliharaan lanjutan pembibitan kelapa sawit	1 Ha	1 Ha		1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha			20%	20%	20%	0%
	(3) pembibitan/pemeliharaan pembibitan karet	1 Ha	1 Ha				1 Ha	1 Ha	1 Ha						0%	0%	0%	0%	0%
	(4) pemeliharaan kebun entres karet	4 Ha	4 Ha		4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(5) pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	228 Ha	228 Ha		228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(6) penetapan/pemeliharaan BPT kopi exelse	50 Ha	50 Ha		50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(7) pengembangan/peremajaan kebun kelapa rakyat	2500 Ha	2500 Ha		500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	600 Ha	500 Ha	200 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(8)	870 Ha	870 Ha		50 Ha	70 Ha	150 Ha	250 Ha	100 Ha	50 Ha	70 Ha	150 Ha	250	250	6%	8%	17%	29%	11%

	pengembangan/ peremajaan kebun karet rakyat												Ha	Ha					
	(9) pembangunan kebun kakao rakyat	160 Ha	160 Ha				20 Ha	50 Ha	40 Ha			20 Ha	50 Ha						
	(10) pembinaan lintas sektoral	10 Desa	10 Desa		2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa					
	(11) intensifikasi kebun kopi rakyat	500 Ha	500 Ha				200 Ha	250 Ha	100 Ha			250 Ha	250 Ha						
	(12) pengembangan jaringan air dan lahan	1500 Ha	1500 Ha		500 Ha	600 Ha	425 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	600 Ha		425 Ha						
	(13) pengolahan data statistic perkebunan	20 Buku	20 Buku		20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku					

Sedangkan untuk Bidang Peternakan gambaran kinerja pelayanan lima tahunan 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**  
**Bidang Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	<b><i>Program Peningkatan produksi hasil peternakan</i></b>																		
	a. Peningkatan populasi ternak (ekor) Sapi																		
	Kerbau									6.510	7.121	6.488	7.044	7.193					
	Kambing									444	510	530	593	607					
	Domba									36.745	43.575	46.603	48.481	40.195					
	Ayam buras									1029	1.115	1.244	1.390	634					
	Itik									556.689	699.228	763.475	839.822	913.465					
										58.500	67.267	95.136	109.373	83.447					
	b. Terlaksananya gertak birahi				1.100 ekor	1.100 ekor	1.100 ekor	1.500 ekor	2000 ekor	1.357 ekor	1.625 ekor	2.000 ekor	1.091 ekor	1.731 ekor	123,3	147,7	181,8	72,7	86,6
	c. Terlaksananya pelatihan P2WKSS				0	2	2	2	0	2 klp	2 klp	2 klp	2 klp		139,7	115,2	113,2	109,6	104,1
	d. Kelahiran sapi IB				600 ekor	700 ekor	800 ekor	900 ekor	1.000 ekor	838 ekor	806 ekor	905 ekor	986 ekor	1.041 ekor	-	100	100	100	81,8
	e. Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil				0	0	2 klpk	2 klpk	2 klpk	-	-	2 klpk	2 klpk		166,7	60	111,2	86,4	-
	f. Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	50,8	100	-
	g. Penetasan DOD				0	500 ekor	750 ekor	1000 ekor	1250 ekor	50 ekor	500 ekor	750 ekor	1.000 ekor	1.022 ekor	100	-	-	-	-

	h. Tersebarnya ternak budidaya				30 ekor	50 ekor	90 ekor	110 ekor	100 ekor	30 ekor	30 ekor	100 ekor	95 ekor	0					
	i. Tersebarnya ternak bakalan				30 ekor	20 ekor	35 ekor	40 ekor	50 ekor	20 ekor	20 ekor	15 ekor	40 ekor	-					
	j. Tersebarnya gaduhan ternak kambing				20 ekor	0	0	0	0	-	-	-	-		100	-	100	150	100
	k. Tersebarnya gaduhan itik dara				1000 ekor	0	550 ekor	1000 ekor	1000 ekor	1000 ekor	-	550 ekor	1.500 ekor	1000 ekor	-	-	100	-	-
	l. Tersebarnya gaduhan itik DOD				0	0	500 ekor	0	1000 ekor	0	0	500 ekor	0		100	100	100	100	100
	m. Terlaksananya lomba peternak dan petugas				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali					
	n. Terlaksananya pelatihan petani penerima bansos				5 klpk	8 klpk	6 klpk	0	0	5 klpk	8 klpk	6 klpk	0	0	100	100	100	-	-
2.	<b><u>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</u></b>																		
	a. Pengobatan ternak				1000 ekor	1.500 ekor	1000 ekor	1000 ekor	1.500 ekor	1000 ekor	1.500 ekor	1.500 ekor	1950 ekor	1.820 ekor	100	100	150	195	121,4
	b. Vaksinasi				3000 ekor	5000 ekor	5000 ekor	5000 ekor	2000 ekor	6000 ekor	3.725 ekor	4.930 ekor	4.500 ekor	4.538	200	74,5	98,6	90	226,9
	c. Pemeriksaan kebuntingan (PKB)				500 ekor	500 ekor	500 ekor	1.500 ekor	1.500 ekor	718 ekor	775 ekor	1.200 ekor	1.700 ekor	1.200 ekor	143,6	155	240	113,4	80
	d. Pengambilan specimen				1000 ekor	500 ekor	500 ekor	1000 ekor	1000 ekor	1000 ekor	500 ekor	240 ekor	1100 ekor	1.060 ekor	100	100	48	110	106
	e. Data Lalu lintas ternak				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	100	100	100
	f. Data penyakit Ternak				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	100	100	100
	g. Ketersediaan obat ternak dan peralatan medis				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
3.	<b><u>Program peningkatan pemasaran hasil peternakan</u></b>																		
	a. Terlaksananya HKP Propinsi Jambi				1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	b. Terlaksananya pameran				1 kali					1 kali					100	-	-	-	-
	c. Tersedianya laporan informasi pasar				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	100	100	100

	d. Terlaksananya Panen ternak hasil IB					-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100	-	-
	e. Terdatanya data jual beli ternak					-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-		100	100
4.	<b><u>Program Peningkatan kesejahteraan petani</u></b>																		
	a. Terlaksananya pertemuan kelompok petani SMD dan LM3	-			4 kali	4 kali	3 kali	0	0	4 kali	4 kali	3 kali	0	0	100	100	100	100	100
5.	<b><u>Program Peningkatan Teknologi Peternakan</u></b>																		
	a. Tersedianya Peralatan Teknologi Tepat Guna	-			4 unit	3 unit	9 unit	14 unit	5 unit	6 unit	11 unit	5 unit	12 unit	-	150	366,7	55,6	85,8	-



Tabel 2.7.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD  
Bidang Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2011 - 2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggraan Tahun Ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Program Peningkatan produksi Hasil peternakan</i>	1.720.095.950	1.663.784.150	2.782.584.100	3.338.198.500	1.507.375.520	1.680.244.950	1.397.100.450	1.768.903.750	2.398.623.256	1.445.354.138	97,7%	83,9%	63,6%	71,9%	95,9%		
<i>Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</i>	381.773.000	685.461.500	774.836.950	973.791.500	773.186.500	345.182.000	593.357.850	736.734.450	902.136.500	754.279.500	90,4%	86,6%	95,1%	92,7%	97,6%		
<i>Program peningkatan pemasaran hasil produksipeternakan</i>	103.022.000	38.102.000	118.469.350	234.515.000	235.316.900	73.167.000	38.102.000	114.139.350	207.390.900	232.263.900	71,0%	100%	96,3%	88,5%	98,7%		
<i>Program peningkatan kesejahteraan petani</i>	32.537.000	35.525.000	38.132.200	-	-	32.152.000	32.425.000	38.132.200			98,8%	91,3%	100%				

<b><i>Program peningkatan teknologi peternakan</i></b>	161.926.050	257.449.050	184.390.250	334.788.000	69.288.100	158.123.500	248.912.000	101.315.250	281.942.000	69.000.100	97,7%	96,7%	54,9%	84,3%	99,58%		

Dari Tabel terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi sapi dari 6.510 ekor ditahun 2011 menjadi 7.193 ekor di tahun 2015 dengan laju kenaikan 10,49 % selama 5 tahun.



Peningkatan angka kelahiran ternak sapi tidak diiringi dengan peningkatan populasi secara signifikan, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah ternak yang dipotong dan banyaknya jumlah ternak yang dijual keluar daerah, selain itu untuk perhitungan populasi ternak tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi dipengaruhi juga dengan pemotongan ternak, pengeluaran ternak, pemasukan ternak dan kematian ternak. Hal yang sama juga terjadi pada ternak kerbau, dimana terjadi kenaikan populasi ternak kerbau dari 444 ekor ditahun 2011 menjadi 607 ekor pada tahun 2015 dengan laju kenaikan 36,71 % selama 5 tahun. Terjadinya peningkatan populasi ini perlu dipertahankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Untuk ternak unggas ayam buras dan itik populasinya juga terus meningkat selama 5 tahun untuk pertumbuhan

ayam buras 64% sedangkan ternak itik terjadi pertumbuhan 42,64 %. Sementara untuk ayam broiler (ayam pedaging) dan ayam ras petelur memang tidak dipelihara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dikarenakan harga pakan yang cukup mahal sehingga kalau pemeliharannya dalam skala kecil, peternak tidak dapat keuntungan. Untuk memenuhi kebutuhan daging ayam broiler pedagang langsung membeli ayam yang siap potong sehingga untuk konsumsi daging ayam broiler di Tanjab Barat masih mencukupi, begitu juga untuk telur ayam ras masih mendatangkan telur dari luar daerah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Untuk penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan **Bidang Perkebunan** dan **Peternakan** memiliki beberapa **tantangan** sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan dan Peternakan dibandingkan dengan produktifitas nasional.
2. Rendahnya mutu hasil olahan/industri perkebunan yang menyebabkan rendahnya harga tawar akan produk komoditi perkebunan.
3. Tingkat SDM pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah dan kurang terampil menjadikan produk perkebunan tidak memiliki daya saing di pasar domestic dan regional.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan dan peternakan.
5. Masih tingginya serangan organisme pengganggu tanaman dan gangguan usaha perkebunan.
6. Meningkatnya permintaan akan produk ternak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kesejahteraan dan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. Kondisi Perekonomian Global Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
8. Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam sangat berpengaruh terhadap kesehatan ternak sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak.
9. Harga Daging Sapi yang setiap tahun terus naik.

Adapun **peluang** yang akan mendukung pengembangan pelayanan yang akan dilakukan di **Bidang Perkebunan dan Peternakan** yaitu :

1. Daerah strategis berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
3. Tersedianya potensi lahan yang memadai.
4. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan.
5. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry.
6. Pendanaan APBD berorientasi pada kinerja.
7. Masih luas lahan untuk sektor peternakan.
8. Integrasi sapi sawit.
9. Pemasaran produk peternakan berdekatan dengan SIJORI.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2011–2016 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh petani, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala



yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di ***Bidang Perkebunan dan Peternakan*** Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu :

- (1) Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan.

- (2) Rendahnya mutu hasil/olahan yang menyebabkan rendahnya harga tawar menawar akan produk komoditi perkebunan dan peternakan.
- (3) Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan peternakan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah.
- (4) Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan dan peternakan.
- (5) Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan dan peternakan.
- (6) Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan.
- (7) Tata ruang bidang peternakan didaerah tidak diatur secara mendetail.
- (8) Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal.
- (9) Kurangnya tenaga medis dan paramedis.
- (10) Kurangnya modal petani, sehingga selalu tergantung dengan bantuan pemerintah.
- (11) Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas.
- (12) Rendahnya Mutu produk hasil peternakan dan masih tingginya serangan penyakit hewan menular.

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini :



**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD**  
**Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>Bidang Peternakan.</u></b>					
Persentase pertumbuhan dan populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 2 % per tahun	a. SDM petugas peternak b. Masih tingginya kematian ternak c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya ketersediaan obat hewan	a. Banyaknya pemotongan betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Pencurian ternak masih banyak d. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan	a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis b. Kelembagaan dan SDM Peternak c. Regulasi /Tata Ruang bidang peternakan d. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis e. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal.
<b><u>Bidang Perkebunan.</u></b>					
Produksi Hasil Perkebunan	Produksi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Persentase pertumbuhan Produksi Perkebunan	a. SDM Petugas Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan	a. Pengetahuan petani yg masih rendah dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna. b. Kurangnya penggunaan IPTEK.	a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani b. Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan
Mutu Produk hasil			Ketersediaan teknologi tepat	a. Masih tingginya	Pengetahuan SDM

perkebunan			guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan	serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan. b. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan c. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah	perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan
------------	--	--	--	--	---

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan**  
**Wakil Bupati**

<b>Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	<p><b>Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agro Industri dan Perikanan</b></p> <p>1. Program Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan (peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan alat mesin pertanian dan sarana sarana produksi)</p> <p>2. Program Peningkatan nilai tukar petani (peningkatan kualitas produksi, fasilitas akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produksi, peningkatan keterampilan petani dan pengetahuan petani.</p>	<b>Bidang</b>	<b>PETERNAKAN</b>	
		<p>1.SDM petugas dan peternak</p> <p>2.Masih tingginya kematian ternak</p> <p>3.Minimnya sarana dan prasarana</p> <p>4.Kurangnya ketersediaan obat hewan</p>	<p>1. Tingginya pemotongan betina produktif</p> <p>2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berstandar SNI</p> <p>3. Minimnya ketersediaan indukan</p> <p>4. Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor peternakan</p> <p>5. Ketersediaan pakan yang berkualitas masih rendah</p> <p>6. Penerapan teknologi pengolahan pakan belum optimal</p> <p>7. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal</p>	<p>1. Kapasitas tampung wilayah untuk ternak masih tinggi</p> <p>2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik</p> <p>3. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)</p> <p>4. Kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa</p> <p>5. Sumber daya pakan melimpah</p> <p>6. Integrasi tanaman dan ternak</p>
		<b>Bidang</b>	<b>PERKEBUNAN</b>	

	<p>3. Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna</p> <p>4. Program Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan (misi 2)</p>	<p>a. SDM Petugas Teknis Perkebunan</p> <p>b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p> <p>a. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan</p>	<p>a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani</p> <p>b. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan</p> <p>c. Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan</p> <p>c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p>	<p>a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru perkebunan seperti kakao</p> <p>b. Keterbukaan akses transportasi darat yg semakin meningkat untuk arus lalu lintas perkebunan.</p> <p>c. Posisi Kab. Tanjung Jabung Barat yg strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro.</p> <p>d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.</p>
--	---	--	--	--

### 3.2. Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016 -2021.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu dan diselaraskan dengan ***Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.***

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama

kurun waktu 2016-2021 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

*Visi :*  
***Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021** sebagai berikut :

<b>KODE</b>	<b>MISI</b>
<b>MISI 1</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
<b>MISI 2</b>	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
<b>MISI 3</b>	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
<b>MISI 4</b>	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada **Misi Ketiga**, yaitu **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan.**

Sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
2. Meningkatkan Populasi Ternak

Dan untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri	1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	Ton						
			- Produksi Kelapa Sawit		131.068	136.535	139.267	142.051	144.893	147.790
			- Produksi Karet		6.575	4.144	4.913	4.915	4.918	4.921
			- Produksi Kelapa Dalam		50.837	56.941	58.080	59.241	60.428	61.635
			- Produksi Kopi		1.323	1.263	1.288	1.314	1.340	1.367
			- Produksi Pinang		9.426	11.432	11.662	11.895	12.133	12.375
		2. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	2. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	ekor						
			- Populasi Sapi		8.616	8.389	8.557	8.728	8.902	9.801
			- Populasi Kerbau		675	717	740	771	780	811
			- Populasi Kambing		71.586	48.002	48.550	48.910	49.228	49.378
			- Populasi Domba		750	790	816	845	865	890
			- Populasi Unggas		1.819.070	1.099.095	1.054.050	1.211.753	1.272.340	2.335.957

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu “**Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**” dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional tersebut, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Pertanian maka Kementerian Pertanian RI menetapkan Visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”.**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Pertanian RI menetapkan **Misi** sebagai berikut :

KODE	MISI
<b>MISI 1</b>	Mewujudkan kedaulatan pangan
<b>MISI 2</b>	Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
<b>MISI 3</b>	Mewujudkan kesejahteraan petani
<b>MISI 4</b>	Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka ditetapkan *Tujuan Pembangunan Pertanian periode 2015 -2019* yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan	
T1	Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
T2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian



T3	Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
T4	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
T5	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut maka ditetapkan Sasaran yg merupakan **Indikator Kinerja (IKSS)** Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam Periode 2015 -2019 adalah :

1. Swasembada Padi, Jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan Diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatkan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Arah kebijakan akan diimplitasikan kedalam Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 Sektor Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
<b>Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Berkelanjutan.</b>	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
	Dukungan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
	Dukungan Perlindungan Perkebunan
	Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen Perkebunan
<b>Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat</b>	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
	Peningkatan Produksi pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosi
	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber daya Lokal
	Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen peternakan
<b>Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian</b>	Pengembangan Pengolahan hasil pertanian Bioindustri
	Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil pertanian
	Pengembangan Usaha dan Investasi
	Pengembangan Pemasaran Internasional
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis lainnya pada Ditjen PPHP
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	Perluasan areal dan Pengelolaan lahan Pertanian
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian
	Penyaluran Pupuk Bersubsidi
	Pengelolaan Sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian
	Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
	Dukungan manajemen dan dukungan tekhnis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada Sektor Perkebunan dan Peternakan Tahun 2015-2019 adalah:

**Tabel 3.3.**  
**Indikator Kinerja Kementerian Pertanian**

No.	Rincian IKU	Baseline	Target					Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1.</b>	<b>Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula</b>							
	Produksi Padi (juta ton)	70,8	73,1	76,2	78,1	80,1	82,1	3,0
	Produksi Jagung (juta ton)	19,0	20,3	21,4	22,4	23,5	24,7	5,4
	Produksi Kedelai (juta ton)	0,95	1,20	1,82	2,76	2,95	3,00	27,5
	Produksi Gula Tebu (hablur) (juta ton)	2,83	2,97	3,27	3,30	3,60	3,82	7,8
	Produksi Daging Sapi dan kerbau (ribu ton karfak dan ribu ton daging)	460,4	545,3	588,6	639,6	695,0	755,1	10,5
		268,4	436,2	470,9	511,7	556,0	604,0	10,5
<b>2.</b>	<b>Peningkatan diversifikasi pangan</b>							
	Skor Pola Pangan Harapan	81,4	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5	3,5
	Konsumsi Kalori (Kkal)	1.987	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150	1,8
<b>3.</b>	<b>Peningkatan komoditas bernilai tambah, berydaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor</b>							
	Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama (%)	8	10	10	10	10	10	10,0
	Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor (%)	7	-5	-5	-1	1	1	-1,0
	Produksi Cabe besar (ribu ton)	1.041	1.082	1.106	1.140	1.174	1.209	3,0
	Produksi Cabe rawit (ribu ton)	735	751	759	770	782	794	1,6
	Produksi Bawang merah (ribu ton)	1.061	1.125	1.173	1.231	1.244	1.360	5,1
	Produksi Mangga (ribu ton)	2.256	2.285	2.344	2.399	2.460	2.519	2,4
	Produksi Nenas (ribu ton)	1.851	1.888	1.926	1.964	2.003	2.042	2,0
	Produksi Manggis (ribu ton)	142	144	147	150	152	155	1,8
	Produksi Salak (ribu ton)	1.038	1.059	1.080	1.102	1.124	1.146	2,0
	Produksi Kentang (ribu ton)	1.296	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	2,0
	Produksi Jeruk Siam (ribu ton)	1.387	1.410	1.438	1.466	1.495	1.513	3,0
	Produksi Karet (Karet kering) (ribu ton)	3.153	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,9
	Produksi Kopi (kopi benyan) (ribu ton)	685	725	700	751	765	779	2,6
	Produksi Kakao (biji kering) (ribu ton)	709	773	831	872	910	961	6,3
	Produksi Lada (lada kering) (ribu ton)	82	83	84	85	86	87	1,1
	Produksi Pala (biji kering) (ribu ton)	28	28	29	30	32	33	5,1
	Produksi Cengkeh (bunga kering) (ribu ton)	111	113	115	117	119	121	1,9
	Produksi Kelapa (setara kopra) (ribu ton)	3.031	3.309	3.355	3.401	3.446	3.491	2,9
	Produksi Teh (daun kering) (ribu ton)	144	160	160	161	162	163	2,6
<b>4.</b>	<b>Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi</b>							
	Produksi Kelapa Sawit (CPO) (ribu ton)	20.344	30.798	30.845	32.657	34.515	36.420	4,4
	Produksi Ubi kayu (ribu ton)	26,4	26,5	27,1	27,8	28,2	28,8	1,7
<b>5.</b>	<b>Peningkatan pendapatan keluarga petani</b>							
	POB pertanian sempit/TK pertanian (Rp. Juta)	8,0	8,3	8,6	9,0	9,4	9,8	4,3
	Tingkat Kemiskinan di pedesaan (juta orang)	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,4	-3,4
<b>6.</b>	<b>Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik</b>							
	Nilai reformasi birokrasi kementerian	65	72	73	74	75	76	
	Opini laporan keuangan kementerian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

### **3.4 Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.**

Visi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi adalah “**Terwujudnya perkebunan yang tangguh berbasis kerakyatan, berwawasan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan**”.

#### **A. MISI.**

**Misi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi 2016 -2021** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan penggunaan benih unggul komoditi perkebunan, serta pengawasan peredaran benih dan sarana Input .
3. Meningkatkan kemandirian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman Perkebunan.
4. Meningkatkan kualitas SDM pekebun melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan Sistik Kebersamaan Ekonomi (SKE)
5. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di areal perkebunan rakyat .
7. Meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta kebakaran lahan dan kebun.
8. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat investor dalam pengembangan perkebunan

9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan

## **B. TUJUAN.**

Dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan pembangunan perkebunan Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatkan dan menetapkan swasembada berkelanjutan.
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

## **C. SASARAN.**

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui visi, misi dan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
2. Investasi usaha perkebunan.
3. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan.
5. Pengembangan komoditi.

### **3.5 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang peternakan tahun 2016 -2021 maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi merumuskan Visi “ **Terwujudnya Kemandirian dan Keamanan Pangan Asal Ternak** “ untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan Pangan asal ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak serta produk ternak
3. Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
4. Mengembangkan kebun binatang menjadi sarana pelestarian , edukasi dan rekreasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi maka tujuan pembangunan peternakan 2016 -2021 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan populasi , produksi dan produktivitas ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan

3. Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitas dan pembinaan lingkungan peternakan
5. Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan
6. Meningkatkan konservasi satwa, edukasi dan litbang serta rekreasi

Sasaran merupakan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016 -2021 adalah ::

1. Meningkatkan populasi , produksi dan produktivitas ternak
2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan dan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta berdaya saing
3. Tersedianya data yang berkualitas untuk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan.
4. Terlaksananya sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana konservasi satwa, edukasi dan litbang serta rekreasi.

Arah kebijakan akan diaplikasikan kedalam program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016– 2021 untuk menuju Jambi Tuntas sebagai berikut :

### **1. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak
- 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Zoonosis
- 3) Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Lalu lintas Hewan

### **2. Program Peningkatan Produksi Peternakan**

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan Ternak
2. Pengembangan Balai Perbibitan Ternak.
3. Pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).
4. Pengembangan Integrasi Peternakan.
5. Pengembangan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan.

### **3. Program Pengembangan Usaha Peternakan**

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 2) Penguatan Kelembagaan Peternakan
- 3) Permodalan dan Investasi

### **7. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Produk Peternakan Yang ASUH



- 2) Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- 3) Penerapan Kesrawan dan Perlindungan Masyarakat

#### **8. Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet**

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Keswan dan Kesmavet
- 2) Monitoring, Surveilans dan pemeriksaan

#### **9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan
- 2) Monitoring dan Evaluasi
- 3) Statistik Peternakan
- 4) Penata Usahaan Pelaporan Keuangan

#### **10. Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi Masyarakat**

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan Kebun Binatang
- 2) Pemeliharaan dan Perawatan Satwa

Berdasarkan telaahan pada subbab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan permasalahan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L diterangkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produksi Daging ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga medis dan paramedis</li> <li>2. Kelembagaan dan SDM Peternak</li> <li>3. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis</li> <li>4. Kurangnya Modal Peternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beternak masih secara tradisional (usaha sambilan)</li> <li>2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas</li> <li>3. Minimnya ketersediaan indukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi</li> <li>2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik</li> <li>3. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)</li> </ol>
2	Peningkatan Produksi Perkebunan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopi.</li> <li>2. Karet</li> <li>3. Kelapa Dalam</li> <li>4. Kelapa Sawit (CPO)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SDM Petugas Teknis Perkebunan</li> <li>b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</li> <li>c. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani</li> <li>b. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan</li> <li>c. Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan</li> <li>d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru perkebunan seperti kakao.</li> <li>b. Keterbukaan akses transportasi darat yg semakin meningkat untuk arus lalu lintas perkebunan.</li> <li>c. Posisi Kab. Tanjung Jabung Barat yg strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro.</li> <li>d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.</li> </ol>

### **3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Perkebunan Peternakan. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Peternakan secara optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (**RTRW**) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf (2) Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36 yang berisikan :

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b meliputi:
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan
  - b. kawasan hortikultura
  - c. kawasan perkebunan dan
  - d. kawasan peternakan
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Pengembangan sentra peternakan sapi berada tersebar di Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing Tinggi;

- b. Pengembangan sentra peternakan komoditas unggas berada tersebar di Kecamatan Bram Itam
  - c. Kawasan pengembangan ternak terintegrasi dengan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
- (3) Bagian ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang pasal 68.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- (a) Penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
  - (b) Pengembangan sentra bibit unggul
  - (c) Pengembangan sentra pengolahan pakan ternak
  - (d) Pengembangan pengolahan hasil peternakan
  - (e) Pengembangan pengolahan kotoran ternak
  - (f) Peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging dan
  - (g) Peningkatan sarana dan prasarana peternakan
- (5) Bagian Kedua ketentuan Umum Peraturan Zonasi pasal 110 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dalam pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi :
- 1. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - 2. Kawasan peruntukan hortikultura;
  - 3. Kawasan peruntukan perkebunan dan
  - 4. Kawasan peruntukan peternakan
- (6) Pasal 114 berisikan :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 110 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan pemukiman masyarakat.

- b. Ketentuan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah beserta**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>BIDANG PETERNAKAN</b>				
•	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Tata ruang untuk kawasan peternakan sapi di Kecamatan Batang Asam, Bram Itam, Ma. Papalik, Merlung dan Tebing Tinggi</li> <li>• Rencana Tata Ruang untuk ternak unggas Kecamatan Bram Itam</li> <li>• Kawasan Integrasi ternak dan perkebunan</li> </ul>	Usaha Peternakan menggunakan lahan kosong dipemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan	• Tidak ada regulasi tata ruang untuk peternakan	• Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)
<b>BIDANG PERKEBUNAN</b>				
•	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Tata Ruang Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Peternakan di Kec.Tungkal Ulu, Merlung, Ma.Papalik, Tebing Tinggi, Batang Asam</li> <li>• Road Map Pengembangan Perkebunan Tanjung Jabung Barat</li> </ul>	Penyediaan Bibit dan Teknologi Tepat Guna serta Tenaga Ahli dalam Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Anggaran APBD yg Defisit</li> <li>• Kerjasama yg kurang dalam Bentuk Dana CSR dengan Perusahaan yg terdapat pada wilayah kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Geografis yg memadai dalam pengembangan jenis perkebunan lainnya</li> <li>• Kondisi Geografis yang strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI yang merupakan Lalu Lintas Perdagangan Internasional.</li> <li>• Terbuka peluang Kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui dana APBN</li> </ul>

**Tabel 3.6**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KHLs beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KHLs Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>BIDANG PETERNAKAN</b>				
•	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digestasi kotoran hewan untuk menghasilkan CH<sub>4</sub> sebagai biogas</li> <li>• Peningkatan penggunaan kotoran hewan untuk pupuk</li> </ul>	a. Kurangnya SDM peternak dalam penggunaan TTG	Kurangnya penyaluran modal peternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi</li> <li>• Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik</li> <li>• Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)</li> </ul>
<b>BIDANG PERKEBUNAN</b>				
•	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang Pengembangan Desa/Kawasan Sentra Agrobisnis yg mengabungkan Perkebunan dan Peternakan</li> <li>• Penentuan Kawasan <b>Perkebunan Induk</b></li> </ul>	Kurangnya ketersediaan SDM, sarana dan prasarana pendukung	Pengetahuan Petani dalam memahami pengembangan sector Agrobisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Kawasan Perkebunan yang cukup baik dalam pembentukan kawasan Agroindustri dan Kawasan <b>Perkebunan Induk</b></li> </ul>

### 3.7 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan salah satu 9 (sembilan) Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla atau yang sering disebut dengan Nawacita yaitu mewujudkan **Kemandirian Ekonomi** dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana sektor **Perkebunan dan Peternakan** merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sesuai dengan Nawacita Visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan memilih *kedaulatan pangan asal ternak* pemilihan kedaulatan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang peternakan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi



merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan Perkebunan dan Peternakan terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan peternakan. Dalam menjalankan tugas pokok fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapi Permasalahan antara lain :

- 1) Minimnya Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana
- 2) Tata ruang bidang perkebunan dan peternakan didaerah tidak diatur secara mendetail
- 3) Belum adanya regulasi (Perda) di bidang perkebunan dan peternakan
- 4) Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal
- 5) Kurangnya tenaga medis dan paramedis
- 6) Kurangnya modal petani, sehingga selalu tergantung dengan bantuan pemerintah
- 7) Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan peternakan belum optimal
- 8) Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas
- 9) Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan
- 10) Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan menular serta gangguan usaha perkebunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi **Isu-Isu Strategis** antara lain :

1. Masih tingginya pemotongan betina produktif dan minimnya ketersediaan indukan dan bibit yang berkualitas.
2. Masih rendahnya produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan peternakan.
3. Masih kurangnya SDM petani kebun dan peternak.
4. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing agribisnis perkebunan dan peternakan
5. Masih kurangnya anggaran untuk sektor perkebunan dan peternakan
6. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani kebun dan peternak.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat ditetapkanlah **Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat*** sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri	1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	Ton						
			- Produksi Kelapa Sawit		131.068	136.535	139.267	142.051	144.893	147.790
			- Produksi Karet		6.575	4.144	4.913	4.915	4.918	4.921
			- Produksi Kelapa Dalam		50.837	56.941	58.080	59.241	60.428	61.635
			- Produksi Kopi		1.323	1.263	1.288	1.314	1.340	1.367
			- Produksi Pinang		9.426	11.432	11.662	11.895	12.133	12.375
		2. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	2. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	ekor						
			- Populasi Sapi		8.616	8.389	8.557	8.728	8.902	9.801
			- Populasi Kerbau		675	717	740	771	780	811
			- Populasi Kambing		71.586	48.002	48.550	48.910	49.228	49.378
			- Populasi Domba		750	790	816	845	865	890
			- Populasi Unggas		1.819.070	1.099.095	1.054.050	1.211.753	1.272.340	2.335.957

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

#### **I. Strategi**

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui *Intensifikasi, Extensifikasi* dan *Diversifikasi*.
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui **Gerakan Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)**, Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.

5. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui **UPPO, Rumah Kompos, Biogas** dan lain lain.
6. Pengembangan *Sentra Agribisnis* di kawasan Sentra Perkebunan dan Peternakan.
7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

## **II. K e b i j a k a n.**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. **Kebijakan Umum** Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.

2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran**, dan **Kebijakan**, dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut ini:

**Tabel 5.1**  
 Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan  
 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
 Tahun 2016 - 2021

<b>VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS ”</b>			
<b>MISI 3 : “ Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri ”.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan</li> <li>2. Meningkatnya Populasi Ternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan.</li> <li>2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman.</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh dan Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>4. Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan</li> </ol> <p>Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu.</li> <li>2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan Pestisida.</li> <li>3. Penyebaran dan pemanfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaan Kelompok Tani</li> <li>4. Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yang merupakan penunjang pengolahan perkebunan</li> </ol> <p>Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan populasi dan produksi peternakan</p>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penetapan **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan** pada Dinas Perkebunan telah menyesuaikan dengan **Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016- 2021** sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian **Tujuan** dan **Sasaran RPJMD**, dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini, yaitu :



TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
efisien, berwibawa, transparan dan profesional			Pengembangan SDM	jumlah PNS yg mengikuti pelatihan/diklat	5 org	5 org	25,000,000	5 org	25,000,000	3 org	15,000,000	3 org	15,000,000	3 org	15,000,000	3 org	15,000,000	22 org	110,000,000			Tanjung Jabung Barat	
Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK	Meningkatnya Promosi dan Publikasi Hasil Produk Unggulan Perkebunan		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Promosi produk unggulan perkebunan	4 kl	4 kl	95,281,500	3 kl	118,040,000	2 kl	68,970,000	2 kl	75,867,000	2 kl	83,453,700	2 kl	91,799,070	15 kl	533,411,270	Disbunak		Tanjung Jabung Barat	
			Promosi atas hasil produksi perkebunan	frekuensi pelaksanaan publikasi dan promosi produk unggulan daerah	4 kl	4 kl	95,281,500	2 kl	118,040,000	2 kl	68,970,000	2 kl	75,867,000	2 kl	83,453,700	2 kl	91,799,070	14 kl	533,411,270	Disbunak		Tanjung Jabung Barat	
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	21 KT	6 KT	272,201,000	10 KT	356,000,000	10 KT	290,560,000	10 KT	1,794,700,000	10 KT	1,896,020,000	10 KT	2,003,627,500	56 KT	6,613,108,500	Disbunak		Tanjung Jabung Barat	
			Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan	terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana perkebunan	21 KT	6 KT	272,201,000	10 KT	356,000,000	10 KT	290,560,000	10 KT	1,794,700,000	10 KT	1,896,020,000	10 KT	2,003,627,500	56 KT	6,613,108,500	Disbunak		Tanjung Jabung Barat	
				- Sarana lantai jemur	-	-	-	100 kodi	150,000,000	100 kodi	150,000,000	100 kodi	165,000,000	100 kodi	181,500,000	100 kodi	199,650,000	500 kodi	846,150,000	Disbunak			
				- Mesin Pengolah Pasca Panen	-	-	-	6 unit	84,000,000	2 unit	28,000,000	2 unit	30,800,000	2 unit	33,880,000	2 unit	37,268,000	14 unit	213,948,000	Disbunak			
				- Mesin Chopper	-	-	-	-	-	2 unit	60,000,000	2 unit	66,000,000	2 unit	72,600,000	2 unit	79,860,000	8 unit	278,460,000	Disbunak			
				- Peralatan Labor dan lainnya	-	-	-	-	-	1 unit	3,000,000	1 unit	3,300,000	1 unit	3,630,000	1 unit	3,993,000	4 unit	13,923,000	Disbunak			
				- Biogas	2 unit	-	-	1 unit	40,000,000	-	-	1 unit	45,000,000	1 unit	46,350,000	1 unit	47,740,500	6 unit	228,650,500	Disbunak			
				- Jalan Produksi Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	5 Km	1,484,600,000	5 Km	1,558,060,000	5 Km	1,635,116,000	15 Km	4,677,776,000	Disbunak			
Meningkatkan Produksi komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan	Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi (ton) komoditi unggulan: kopi, karet, sawit, pinang, kelapa dalam			1,333,282,100		1,603,505,500		2,290,631,250		2,624,535,353		2,722,447,859		1,886,237,580	-	12,460,639,641	Disbunak		Tanjung Jabung Barat	
			Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	luas lahan terairi TAM	100 Ha	173 Ha	141,938,550	100 Ha	118,200,000	100 Ha	135,230,000	100 Ha	141,991,500	100 Ha	149,091,075	100 Ha	156,545,629	673 Ha	842,996,754			Tanjung Jabung Barat	
			Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat	luas lahan kopi rakyat yang diintensifikasi	290 ha	90 ha	255,505,800	50 ha	144,600,000			50 ha	148,938,000	50 ha	153,406,140	50 ha	158,008,324	290 ha	860,458,264			Tanjung Jabung Barat	
			Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom	terpeliharanya BPT kelapa, pinang dan kopi libtukom			184,827,000		124,947,000		110,161,000		115,669,050		121,452,503		127,525,128		784,581,680			Tanjung Jabung Barat	
				- Kelapa	3717 PIK	3717 PIK		3717 PIK		3717 PIK		3717 PIK		3717 PIK		3717 PIK		22302 PIK	-				
				- Pinang	250 PIP	250 PIP		250 PIP		250 PIP		250 PIP		250 PIP		250 PIP		1500 PIP	-				
				- Kopi Libtukom	30 ha	30 ha		30 ha		30 ha		30 ha		30 ha		30 ha		180 ha	-				
			Pembibitan Kelapa Sawit	jumlah bibit kelapa sawit bermutu yang disediakan		10,000 kcbh	286,001,300	7,500 kcbh	335,000,000	7,500 kcbh	306,501,400	10,000 kcbh	312,631,428	10,000 kcbh	318,884,057	10,000 kcbh	325,261,738	55,000 kcbh	1,884,279,922			Tanjung Jabung Barat	
			Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Konflik Lahan Perkebunan	terlaksananya pencegahan dan pengendalian karhulla dan konflik lahan	13 kec	13 kec		13 kec	152,591,000	13 kec	131,300,000	13 kec	133,926,000	13 kec	136,604,520	13 kec	139,336,610	78 kec	693,758,130			Tanjung Jabung Barat	
			Peningkatan, Pembinaan, Pengawasan Pupuk dan Pesticida	terlaksananya pembinaan, pengawasan pupuk dan pestisida	13 kec	13 kec		13 kec	40,325,000	13 kec	56,065,000	13 kec	57,186,300	13 kec	58,330,026	13 kec	59,496,627	78 kec	271,402,953			Tanjung Jabung Barat	
			Pembinaan Lintas Sektoral	terlaksananya pembinaan lintas sektoral	2 desa		102,258,100	2 desa	88,980,000	2 desa	67,480,600	2 desa	68,830,212	2 desa	70,206,816	2 desa	71,610,953	10 desa	469,366,681			Tanjung Jabung Barat	
			- Pelatihan Dinamika Kelompok					50		50		50		50		50		250	-			Tanjung Jabung Barat	
			- Pengadaan bibit unggul tanaman					1		1		1		1		1		5	-			Tanjung Jabung Barat	
			- Pengadaan pupuk dan obatan tanaman					1		1		1		1		1		5	-			Tanjung Jabung Barat	
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	Luas kebun rakyat yang teratasi dari serangan OPT	100 ha		74,865,000	100 ha	119,595,000	200 ha	106,395,000	200 ha	108,522,900	200 ha	110,693,358	200 ha	112,907,225	900 ha	632,978,483			Tanjung Jabung Barat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan	Jumlah lokasi terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	30 lok	30 titik lok	151,975,550	30 titik lok	87,310,000	30 titik lok	59,660,000	30 titik lok	61,449,800	30 titik lok	63,293,294	30 titik lok	65,192,093	180 titik lok	488,880,737		Tanjung Jabung Barat		
			Revitiliasi kebun Kopi Libtukom	luas lahan peremajaan kopi libtukom		15 ha	142,797,500	100 ha	834,000,000	100 ha	867,360,000	100 ha	902,054,400	100 ha	902,054,400			315 ha	2,746,211,900	PBD/APE	Tanjung Jabung Barat		
			Facilitasi Peremajaan kebun Kelapa Sawit	luas lahan peremajaan kelapa sawit		800 ha	62,560,000	500 ha	151,715,000	500 ha	159,300,750	500 ha	167,265,788	500 ha	175,629,077			2800 ha	716,470,614	PBD/APE	Tanjung Jabung Barat		
			Pemeliharaan Demplot Kelapa Dalam	Luas demplot kelapa dalam yang dipelihara		10 ha	136,480,000	10 ha	143,304,000	10 ha	150,469,200	10 ha	157,992,660	10 ha	165,527,120			40 ha	588,245,860		Tanjung Jabung Barat		
			Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres	Luas kebun percontohan kopi LIBTUKOM, kelapa sawit dan entres yang dipelihara	11 ha	9 ha	135,910,800	14 ha	186,600,000	14 ha	195,643,250	14 ha	205,425,413	14 ha	215,696,683	14 ha	226,481,517	79 ha	1,165,757,663		Tanjung Jabung Barat		
Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemanfaatan IPTEK	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Peternakan		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan	Persentase pelaksanaan koordinasi antar penyuluh dan instansi terkait	100%	-	100%	154,310,000	100%	75,310,000	100%	77,569,300	100%	79,896,379	100%	82,293,270	100%	469,378,949	Disbun k	Tanjung Jabung Barat			
			Pertemuan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	jumlah pertemuan koordinasi penyuluh perkebunan/peternakan	12 kl	12 kl	154,310,000	4 kl	75,310,000	4 kl	77,569,300	4 kl	79,896,379	4 kl	82,293,270	28 kl	469,378,949		Tanjung Jabung Barat				
Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak	Meningkatnya populasi ternak dan menurunnya angka kematian ternak		Program Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak	1.5%	2%	556,071,000	1.9%	562,149,000	1.8%	498,161,930	1.7%	548,106,788	1.6%	565,249,992	1.5%	582,942,491	1.5%	3,312,681,201	Disbun k	Tanjung Jabung Barat		
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah ternak yg terlayani :		462,591,000		475,799,000		423,461,930		471,165,788		486,000,762		501,315,784		-	2,820,334,264		Tanjung Jabung Barat		
				- Pengobatan	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	2000 ekr	12000 ekr	-			Tanjung Jabung Barat
				- PKB	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	6000 ekr	-			Tanjung Jabung Barat
				- Pemeriksaan Spesimen	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	1000 ekr	6000 ekr	-			Tanjung Jabung Barat
				- Vaksinasi	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	2500 ekr	15000 ekr	-			Tanjung Jabung Barat
				- Eliminasi	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	100 ekr	600 ekr	-			Tanjung Jabung Barat
			Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	frekuensi pengawasan perdagangan ternak dan pemotongan	12 bln	12 bln	93,480,000	12 bln	86,350,000	12 bln	74,700,000	12 bln	76,941,000	12 bln	79,249,230	12 bln	81,626,707	72 bln	492,346,937		Tanjung Jabung Barat		
Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak	Meningkatnya populasi ternak dan menurunnya angka kematian ternak		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase jumlah kelahiran ternak		683,073,000		832,270,000		1,483,529,000	60%	1,417,638,000		1,123,466,013		1,335,125,863	1	6,875,101,876	Disbun k	Tanjung Jabung Barat			
				Penyebaran ternak ruminansia	Jumlah sapi bakalan yang dipelihara				20 ekr	350,000,000	20 ekr	350,000,000	20 ekr	400,000,000	20 ekr	450,000,000	80 ekr	1,550,000,000		Tanjung Jabung Barat			
				Lomba agribisnis peternakan	terlaksananya lomba agribisnis peternakan	1 kl	75,870,000	1 kl	43,635,000	1 kl	45,816,750	1 kl	48,107,588	1 kl	50,512,967	5 kl	263,942,304		Tanjung Jabung Barat				
				Pengembangan Inseminasi Buatan	Jumlah sapi yang di IB dan sinkronisasi birahi	1.000 ekor, 1.000 ekor	327,315,000	1.000 ekor, 1.000 ekor	475,900,000	1.000 ekor, 500 ekor	608,095,000	1.000 ekor, 500 ekor	746,899,750	1.000 ekor, 500 ekor	886,690,850	1.000 ekor, 500 ekor	531,511,943	6.000 ekor, 4.000 ekor	3.076,412,543		Tanjung Jabung Barat		
			Penyanga Hari Besar Keagamaan	Jumlah daging yang disediakan untuk konsumsi hari besar keagamaan	600 kg	122,150,000	600 kg	137,100,000	900 kg	195,100,000	900 kg	204,855,000	900 kg	215,097,750	900 kg	225,852,638	4800 kg	1,100,155,388		Tanjung Jabung Barat			
			Pusat Pengembangan Itik Daerah	Jumlah itik daerah yang dikembangkan		233,608,000	300 ekr	143,400,000	500 ekr	219,969,000						800 ekr	596,977,000		Tanjung Jabung Barat				
			Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif	persentase pemotongan ternak betina produktif			20%	66,730,000	20%	70,066,500	20%	73,569,825	20%	77,248,316	80%	287,614,641				Tanjung Jabung Barat			
			Pengembangan ternak ruminansia dan Sentra Peternakan	Jumlah ternak ruminansia yang dikembangkan, terbentuknya sentra peternakan rakyat, tersedianya database induk ternak						50 ekor, 1 Kelompok SPR, 1 dok	1,072,500,000	50 ekor, 1 Kelompok SPR, 1 dok	1,110,675,000	50 ekor, 1 Kelompok SPR, 1 dok	1,150,295,250	100 ekor, 2 Kelompok SPR, 2 dok	3,333,470,250		Tanjung Jabung Barat				
Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Peternakan		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah kelompok peternak yg menerapkan teknologi peternakan	30 KT	10	118,514,600	2	67,409,000	2	69,431,270	2	72,902,834	2	76,547,975	2	80,375,374	20	485,181,053	Disbun k	Tanjung Jabung Barat		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK			Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok tani peserta pelatihan TTG		10	118,514,600	10	67,409,000	10	69,431,270	10	72,902,834	10	76,547,975	10	80,375,374	60	485,181,053		Tanjung Jabung Barat
Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan dan Peternakan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Peternakan		Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Jumlah komoditi yang dikerjasama-mitrakan antara perusahaan dengan lembaga/asosiasi petani	1 kmdti	1 kmdti	122,800,000	1 kmdti	313,389,550	1 kmdti	287,524,550	1 kmdti	296,150,287	1 kmdti	305,034,795	1 kmdti	314,186,839	5 komoditi	1,639,085,021		Tanjung Jabung Barat
			Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan	terbinanya asosiasi dan terjalannya kerjasama kemitraan			-	5 aso	60,000,000	5 aso	47,750,000	5 aso	49,182,500	5 aso	50,657,975	5 aso	52,177,714	25 aso	259,768,189		Tanjung Jabung Barat
			Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)	jumlah peserta pelatihan SKE			-	125 org	95,174,550	125 org	82,774,550	125 org	85,257,787	125 org	87,815,520	125 org	90,449,986	625 org	441,472,392		Tanjung Jabung Barat
			Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	luas lahan yang terinventarisasi STD-B		1000 ha	122,800,000	700 ha	158,215,000	700 ha	157,000,000	700 ha	161,710,000	700 ha	166,561,300	700 ha	171,558,139	4500 ha	937,844,439		Tanjung Jabung Barat
Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan dan Peternakan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemamfaatan IPTEK	Tersedianya Data dan Informasi Perkebunan dan Peternakan		Program Pengembangan Data/informasi	tersedianya data perkebunan dan Peternakan yg valid dan up to date	100%	100%	554,302,940	100%	634,145,000	100%	624,338,750	100%	643,068,913	100%	662,360,980	100%	682,231,809	100%	3,800,448,392	Disbun	Tanjung Jabung Barat
			Pengolahan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan	jumlah dokumen data statistik perkebunan dan Peternakan	2 dok	2 dok	209,442,700	2 dok	146,630,000	2 dok	170,545,000	2 dok	175,661,350	2 dok	180,931,191	2 dok	186,359,126	12 dok	1,069,569,367		Tanjung Jabung Barat
			Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan	jumlah dokumen RENJA, RKA dan Dokumen SAKIP	4 dok	4 dok	83,105,240	4 dok	104,515,000	4 dok	75,140,000	4 dok	77,394,200	4 dok	79,716,026	4 dok	82,107,507	24 dok	501,977,973		Tanjung Jabung Barat
			Pengelolaan Ternak Pemerintah	jumlah dokumen data ternak pemerintah dan AUTS	1 dok	1 dok	143,800,000	1 dok	147,800,000	1 dok	169,185,000	1 dok	174,260,550	1 dok	179,488,367	1 dok	184,873,017	6 dok	999,406,934		Tanjung Jabung Barat
			Penyusunan Laporan Informasi Pasar Perkebunan/Peternakan	jumlah dokumen informasi pasar peternakan dan perkebunan	2 dok	2 dok	117,955,000	2 dok	235,200,000	2 dok	209,468,750	2 dok	215,752,813	2 dok	222,225,397	2 dok	228,892,159	12 dok	1,229,494,118		Tanjung Jabung Barat
							4,690,377,146		5,719,419,050		7,197,064,817		9,144,376,393		9,253,028,119		8,845,043,773		44,849,309,299		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan **Indikator Kinerja** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian **Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016– 2021** sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian **tujuan** dan **sasaran RPJMD**.

**Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016 – 2021** dapat dilihat pada Tabel 7.1. dibawah ini, yaitu :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021**  
**Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1. Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan								
1	Produksi Sawit (Ton)	131,234	131,068	136,535	139,267	142,051	144,893	147,790	147,790
2	Produksi Karet (Ton)	14,806	6,575	4,144	4,913	4,915	4,918	4,921	4,921
3	Produksi Kelapa (Ton)	54,908	50,837	56,941	58,080	59,241	60,428	61,635	61,635
4	Produksi Kopi (Ton)	1,214	1,323	1,263	1,288	1,314	1,340	1,367	1,367
5	Produksi Pinang (Ton)	9,882	9,426	11,432	11,662	11,895	12,133	12,375	12,375

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2. Persentase Peningkatan Populasi Ternak								
1.	Populasi Sapi (ekor)	7,193	8,616	8,389	8,557	8,728	8,902	9,801	9,801
2.	Populasi Kerbau (ekor)	607	675	717	740	771	780	811	811
3.	Populasi Kambing (ekor)	40,195	71,586	48,002	48,550	48,910	49,228	49,378	49,378
4.	Populasi Domba (ekor)	634	750	790	816	845	865	890	890
5.	Populasi Unggas (ekor)	913,464	1,819,070	1,099,095	1,054,050	1,211,753	1,272,340	2,335,957	2,335,957



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategis Dinas yang memuat **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program** dan **Kegiatan** merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan. Dengan dijalankannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta

catatan dan harapan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana - rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Kuala Tungkal, Mei 2019

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. Melan Bangun

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003